

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Anggaran merupakan suatu komponen penting bagi sebuah instansi dalam pelayanan publik dan proses suatu program yang akan dilaksanakan. Salah satu tercapainya tujuan program anggaran menjadi salah satu hal yang perlu adanya perencanaan dan persiapan yang matang. Tercapainya target keuangan dalam sektor publik harus menentukan biaya keuangan dan transaksi yang ingin dicapai dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pengelolaan keuangan daerah adalah perhitungan kebutuhan modal suatu organisasi yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan perekonomian daerah.

Organisasi sektor publik merupakan organisasi nirlaba yang mengutamakan pelayanan publik guna kesejahteraan rakyat Indonesia dan sebagai bentuk konstitusi negara. Hal ini mendorong keinginan masyarakat akan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabilitas publik di instansi pemerintah. Menurut Ratnasari dkk (2019) upaya kongkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah mengharuskan setiap pengelolaan keuangan negara menyampaikan laporan pertanggung-jawaban pengelolaan keuangan negara dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu.

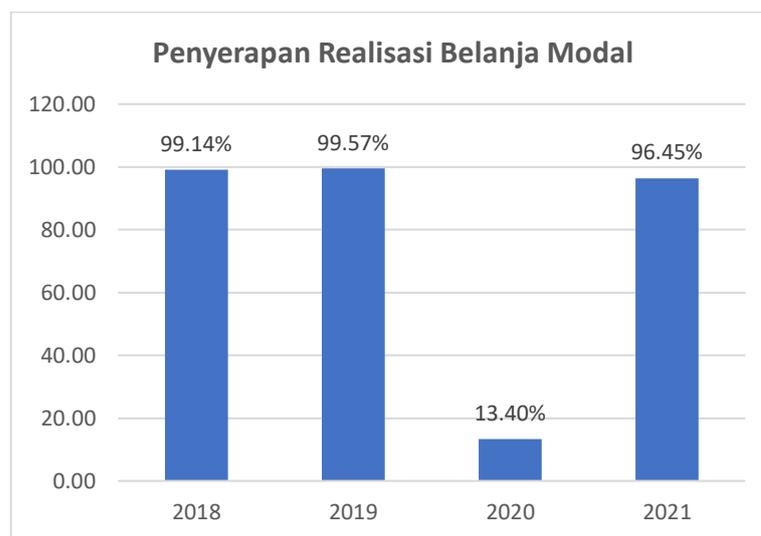
Program yang gagal bisa disebabkan oleh penganggaran yang tidak efisien dan tidak berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu penganggaran sangat penting dilakukan oleh instansi pemerintah. Keberhasilan sasaran dan tujuan organisasi salah satunya dipengaruhi oleh perumusan dan perencanaan penganggaran yang strategis. Alat manajemen untuk mencapai tujuan organisasi salah satunya adalah penganggaran keuangan yang efektif. Pemerintah dipandang perlu menyesuaikan dan menyempurnakan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Menurut Permatasari dkk (2023) untuk mengetahui keberhasilan pemerintah dalam mengelola APBD dapat dilihat dari tingkat kinerjanya. Kinerja yang baik mencerminkan kondisi negara baik dan kinerja yang buruk akan

mencerminkan kondisi negara yang buruk juga. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), telah menerapkan partisipasi setiap satuan-satuan kerja dalam penyusunan anggaran yang termuat dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang biasa disebut RKA SKPD. Dalam RKA SKPD, masing-masing SKPD telah memuat indikator – indikator kinerja yang akan dicapai untuk setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. RKA memuat *input*, *output* dan *outcome* dari masing- masing program dan kegiatan. Jadi dalam RKA memuat sasaran anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dikeluarkan oleh pemerintah kota memberikan informasi yang sangat berguna untuk menilai kinerja ekonomi daerah. LRA ini merupakan laporan keuangan daerah yang disusun terlebih dahulu, sebelum laporan neraca, laporan operasi dan laporan arus kas disusun. Oleh karena itu, LRA merupakan salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang sangat penting. Dinas Sosial Kota Palembang harus menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan untuk menilai apakah anggaran Dinas Sosial Kota Palembang telah dilaksanakan dengan baik atau tidak. Sejauh mana Dinas Sosial Kota Palembang melakukan efisiensi anggaran untuk menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan tidak tepat sasaran.

Belanja dalam LRA Dinas Sosial Kota Palembang merupakan komponen penting yang dapat menggambarkan bagaimana kinerja keuangan yang telah dilaksanakan. Menurut Ratnasari dkk (2019) karena sifat belanja yang relatif mudah dilakukan dan rentan akan terjadinya inefisiensi dan kebocoran, maka tindakan perencanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap belanja daerah sangat penting dilakukan. Setelah dibelanjakan dan dilaporkan dalam LRA, analisis terhadap belanja pun mutlak harus dilakukan untuk dijadikan dasar evaluasi, koreksi dan perbaikan di masa mendatang. Untuk mengetahui hal tersebut, maka perlu dilakukannya pengukuran kinerja keuangan, dimana salah satunya dapat menggunakan analisis *value for money*. Secara konsep, perhitungan *value for money* yang menekankan pada prinsip 3E (Ekonomis, Efisien, dan Efektif), konsep 3E bukan merupakan suatu hal yang baru. Konsep *value for money* ini merupakan suatu prinsip yang penting dari pengelolaan anggaran kinerja suatu pemerintahan

dengan dasar ekonomis (melalui peminimalisiran *input* dengan menghindari pengeluaran yang boros), efisien (pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu, atau *output* tertentu dengan *input* yang terendah) dan efektif (pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan).



Sumber: LRA Dinas Sosial Kota Palembang, 2018-2021

Gambar 1. 1 Penyerapan Realisasi Belanja Modal Dinas Sosial Kota Palembang Tahun 2018-2021

Fenomena yang ditemukan berdasarkan gambar 1.1 bahwa penyerapan anggaran belanja pada Dinas Sosial Kota Palembang jenis belanja modal pada tahun 2018-2021. Dimana pada tahun 2018 realisasi belanja modal sebesar 99,14% dan tahun 2019 sebesar 99,57% tahun tersebut adalah tahun sebelum adanya pandemi *Covid-19*. Awal pandemi dimulai ialah tahun 2020, pada tahun 2021 pandemi telah berlangsung. Namun pada tahun 2020 penyerapan belanja modal mengalami penurunan sebesar 13,40%, namun kembali membaik pada tahun 2021 sebesar 96,45%. Hal ini dapat diartikan adanya penurunan drastis pada anggaran belanja jenis belanja modal pada Dinas Sosial Kota Palembang pada tahun 2020 sebesar 13,40%.

Awal dimulainya pandemi *Covid-19* ialah tahun 2020, yang mana masa tersebut menjadi perhatian bagi seluruh negara terutama negara Indonesia, pandemi *Covid-19* mempengaruhi ekonomi suatu negara. Pada tahun 2019 pergerakan Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia masih tumbuh hingga 5,02%, namun

semenjak adanya *Covid-19* membuat perekonomian pada tahun tersebut anjlok dengan pertumbuhan PDB yang tercatat -2,07% pada 2020. Hal ini menjadi atensi utama untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mengelola belanja dan pelayanannya kepada masyarakat. Demikian juga berlaku untuk Dinas Sosial Kota Palembang.

Tabel 1. 1
Capaian Indikator Kinerja Program Terendah Dinas Sosial Kota Palembang

Tahun	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
2018	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma sebesar	111.394.000	46.394.000	41,65%
2019	Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	2.197.092.000	1.426.278.370	64,92%
2021	Program Pemberdayaan Sosial	239.882.640	181.545.456.000	75,65%
2022	Program Penanganan Bencana	390.104.698	304.142.000	77,96%

Sumber: LKJIP Dinas Sosial Kota Palembang

Berdasarkan laporan kinerja Dinass Sosial Kota Palembang, pada tabel 1.1 alokasi anggaran dan realisasi anggaran pada indikator kinerja dari beberapa program di tahun 2018-2021 yang memiliki capaian kineja terendah. Hal ini mengartikan bahwa dari semua kegiatan program yang dilakukan masih ada program kegiatan yang capaian kinerjanya belum maksimal atau rendah. Susanti (2023) menyatakan masih banyak masyarakat atau PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) mengeluhkan terkait penyaluran bantuan – bantuan sosial yang dinilai tidak adil dimana sebagian masyarakat belum mendapatkan bantuan yang seharusnya didapatkan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH). Menurut Putra (2022), penyaluran bansos di palembang tidak tepat sasaran dikarenakan belum adanya pembaharuan data. Data yang diterima warga Palembang hanya 16%

kategori kurang mampu yang menerima bansos baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Menurut Dwi (2021) Kota Palembang merupakan salah satu daerah di Sumatra Selatan yang serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih minim sebesar 59%.

Konsep *value for money* adalah penilaian kinerja dilakukan untuk mengukur sampai sejauh mana akuntabilitas pemerintah dalam membelanjakan dana publik. *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Pemerintah melaporkan hasil program yang telah dilaksanakannya agar masyarakat dapat menilai apakah pemerintah telah bekerja secara ekonomis, efisien dan efektif. Namun harus mempertimbangkan *input*, *output* dan *outcome* instansi terlebih dulu.

Dinas Sosial Kota Palembang merupakan salah satu organisasi perangkat daerah instansi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang sosial yang memiliki peran dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat dan membutuhkan strategi pengelolaan keuangan. Anggaran merupakan salah satu hal yang terpenting dalam pengambilan strategi yang akan digunakan, pengelolaan keuangan menjadi tolak ukur akan keberhasilan dalam penyerapan anggaran yang baik. Apabila terjadi perbedaan antara anggaran dengan realisasinya maka dapat dijadikan bahan evaluasi untuk penyusunan anggaran pada tahun berikutnya. Program-program dan kegiatan harus membrikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan outcome yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerjanya.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penulis tertarik untuk mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Maidar dkk (2022) perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya objek dan periode yang berbeda, peneliti Maidar dkk (2022) berstudi kasus pada Dinas Sosial Provinsi Aceh sedangkan penelitian

ini di lakukan pada Dinas Sosial Kota Palembang. Berdasarkan latar belakang permasalahan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Realisasi Anggaran Belanja (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Kota Palembang)**”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat di rumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana realisasi anggaran belanja Dinas Sosial Kota Palembang diukur dengan konsep *value for money* sebelum dan selama pandemi *Covid-19* menggunakan rasio ekonomi ?
2. Bagaimana realisasi anggaran belanja Dinas Sosial Kota Palembang diukur dengan konsep *value for money* sebelum dan selama pandemi *Covid-19* menggunakan rasio efesiensi ?
3. Bagaimana realisasi anggaran belanja Dinas Sosial Kota Palembang diukur dengan konsep *value for money* sebelum dan selama pandemi *Covid-19* menggunakan rasio efektivitas ?

1.3 Batasan Masalah

Pada pembatasan masalah ini, agar terfokusnya pembahasan masalah mengenai realisasi anggaran belanja dengan konsep *value for money* yaitu yang terdiri dari rasio ekonomi, rasio efesiensi, dan rasio efektivitas. Penulis juga membatasi masalah pada objek penelitian hanya pada Dinas Sosial Kota Palembang. Pada tahun periode 2018-2021 sebelum dan selama pandemi *Covid-19*.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis kinerja anggaran belanja Dinas Sosial Kota Palembang pada tahun periode 2018-2021 sebelum dan selama *Covid-19*

dengan konsep *value for money* rasio ekonomi.

1. Mengetahui dan menganalisis kinerja anggaran belanja Dinas Sosial Kota Palembang pada tahun periode 2018-2021 sebelum dan selama *Covid-19* dengan konsep *value for money* rasio efektivitas.
2. Mengetahui dan menganalisis kinerja anggaran belanja Dinas Sosial Kota Palembang pada tahun periode 2018-2021 sebelum dan selama *Covid-19* dengan konsep *value for money* rasio efisiensi.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan adalah untuk:

1. Bagi Praktisi
Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan mengenai Kinerja Anggaran Belanja pada Dinas Sosial Kota Palembang.
2. Bagi Peneliti
Sebagai bahan pembelajaran dalam bidang akuntansi dan sebagai syarat menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau acuan penelitian bagi penulis selanjutnya, khususnya mahasiswa program studi Akutansi Sektor Publik Politeknik Negeri Sriwijaya.